

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM
SENGKETA PENGELOLAAN PASAR DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

Disusun Oleh :

Windi Indriani

41151010160028

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada program Studi Hukum

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE EXECUTION OF THE
INDONESIAN NATIONAL ARBITRATION BOARD IN
DISPUTE OF THE MARKET MANAGEMENT IS LINKED TO
LAW NUMBER 30 OF 1999 ON ARBITRATION AND
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION***

Arranged By :

Windi Indriani

41151010160028

SKRIPSI

Submitted to Fulfill One of the Requirements

to Obtain a Bachelor of Law Degree

in the Legal Studies program

Specificity Program : Civil Law



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

DEKAN,

DR. Hj. HERNAWATI RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING

ENI DASUKI SUHARDINI, S.H., M.H

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windi Indriani

NPM : 41151010160028

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM SENGKETA PENGELOLAAN PASAR DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,

Windi Indriani
41151010160028

ABSTRAK

Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan semangat dan harapan bagi masyarakat melalui peranan pemerintah Indonesia yang dapat menemukan cara yang lebih cepat dan menarik para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa. Walaupun arbitrase memiliki kelebihan namun pada praktiknya terdapat kelemahan khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Untuk itu, penulis tertarik mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahannya adalah Bagaimana akibat hukum apabila terjadi penolakan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Pengelolaan Pasar Andir dan Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian data-data yang diperoleh disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil akhir dari penelitian ini yaitu diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap penolakan putusan arbitrase adalah salah satu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, dalam peraturan prosedur BANI Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia terdiri atas hambatan yuridis meliputi eksekusi yang tidak dapat serta merta dilakukan, masih dimungkinkan upaya hukum lain setelah putusan arbitrase, tidak melaksanakan putusan secara sukarela, dan hambatan teknis yaitu kebiasaan masyarakat karena keengganan untuk melaksanakan putusan arbitrase dan upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, merupakan suatu kebutuhan untuk segera mengadakan perubahan maupun penambahan ketentuan di dalam Undang-Undang Arbitrase khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi, agar lembaga arbitrase khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat melaksanakan putusannya sendiri dengan membentuk perangkat jurusita BANI yang sifatnya lebih independen agar tidak terdapat intervensi dari pihak manapun.

ABSTRACT

The Indonesian National Arbitration Board is a way of resolving disputes outside of the judiciary, with the enactment of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a spirit and hope for the community through the role of the Indonesian government who can find a faster and more interesting way for business people to resolve disputes. Although the arbitration has an advantage but in practice there is a weakness especially in the execution of the decision. Therefore, the authors interested in conducting this research in order to identify the problem is how the legal consequences in the event of rejection of the decision of the Indonesian National Arbitration Board and any obstacles that occurred in the execution of the decision to execute the National Arbitration Board of Indonesia.

The method of study used to answer the problem is with normative method of juridical approach and research specification that is descriptive analytical. The data collection techniques are Library Research by collecting secondary data which is the primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Then the obtained data is arranged systematically, which is subsequently analyzed qualitatively.

The final result of this study is derived that the conclusion that the legal consequences of rejection of the arbitral award is one of the interested parties submitting a forced execution request to the Chairman of the District Court. In addition, in the Rules of Procedure BANI Assembly stipulates that there is a deadline for the losing party to implement an arbitral award in which the Tribunal shall determine the sanctions and/or fines and/or interest rates in a reasonable amount if the losing party is negligent in carrying out the ruling the obstacles that occurred in execution of the execution of the ruling of the Indonesian National Arbitration Agency is caused by one of These obstacles consist of juridical barriers of execution that can not necessarily be done, still possible other remedies after the arbitration award, do not execute the ruling voluntarily, and the technical barriers are the customs of the community due to the reluctance to implement the arbitral award and efforts to stalling time as a tactic to not carry out its obligations. Therefore, it is a necessity to immediately make changes and addition stipulated in the Arbitration Act, especially regarding the execution of executions, so that the arbitral institution, especially the Indonesian National Arbitral Board (BANI) can carry out its own decision by establishing a bani bailiff device that is more independent so that there is no intervention from any party.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM SENGKETA PENGELOLAAN PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak lain merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dukungan serta bantuan kepada penulis baik secara moral maupun spritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn.) Dr. H.R. A.R. Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Kabag dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Kepala Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Staf yang telah meluangkan waktunya sehingga memudahkan Peneliti menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman kuliah kelas A1 yang memberikan masukan, dukungan dan dorongan yang bermanfaat kepada penulis.
13. Dan terakhir Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu atas nasehat, dukungan, dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi masa depan penulis.

Secara khusus ucapan terimakasih penulis kepada orang tuaku, Ibu tercinta Enung Nurhayati yang selalu memberikan do'a yang tak pernah putus serta dorongan materil, Bapakku tersayang Muslihin yang selalu memberikan nasihat serta semangat kepada penulis. Tak lupa juga kepada Nenek tercinta Ening yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan penuh selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, serta dukungan seluruh keluarga yang telah memberikan dan mencurahkan segalanya, do'a, semangat yang luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

Bandung, Agustus 2020

Windi Indriani
41151010160028

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ARBITRASE, BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, PUTUSAN ARBITRASE DAN EKSEKUSI	
A. Arbitrase	17
1. Pengertian Arbitrase	17
2. Perjanjian Arbitrase	19
3. Jenis Arbitrase	21
B. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	24
1. Tujuan dan Lingkup Kegiatan BANI	24

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia	26
C. Putusan Arbitrase	32
1. Sifat Putusan dalam Arbitrase	33
2. Syarat-Syarat Putusan Arbitrase	34
3. Sistem Pengambilan Putusan Arbitrase	36
4. Pembatalan Putusan Arbitrase	37
D. Eksekusi	39
1. Pengertian Eksekusi	39
2. Dasar Hukum Eksekusi	39
3. Asas-Asas Eksekusi	40
4. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase	42

BAB III KASUS PENOLAKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

Contoh Kasus Penolakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	47
---	----

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

A. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Pengelolaan Pasar Andir	50
B. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP